

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENINGKATAN KINERJA SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA

Agung Kurnia Putra

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
agungkurnia22@gmail.com

Abstrak

Dimasa sekarang media sosial telah memberikan perubahan pada kehidupan manusia dalam bentuk pola interaksi dikehidupan sosial, yang menembus batas ruang waktu yang sunyi di dunia maya itu. Pada praktiknya, peran media sosial dapat berdampak positif maupun negatif. Dalam peningkatan kinerja satuan reserse kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan mengenai peran media sosial yang dimanfaatkan oleh Polres Kinerja Satuan Reserse Kriminal (SATRESKIM) Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Kata Kunci: Media Sosial, Reserse Kriminal, Polres.

Abstract

In the era of social media, it has given changes to human life in the form of interaction patterns in today's social life, which penetrate the boundaries of the silent space of time in the virtual world. In practice, the role of social media can have a positive or negative impact. In improving the performance of the Criminal Investigation Unit of the Tanjung Perak Harbor Police, Surabaya. Therefore, this article will explain the role of social media used by the SATRESKIM Polres Tanjung Perak Port, Surabaya.

Keywords: Social Media, Criminal Investigation, Police.

PENDAHULUAN

Dimasa sekarang media sosial telah memberikan perubahan pada kehidupan manusia dalam bentuk pola interaksi dikehidupan sosial, yang menembus batas ruang waktu yang sunyi di dunia maya itu. Media sosial kini telah hadir sebagai pesaing media yang secara fisik yang telah hadir dalam kehidupan manusia, seperti koran, majalah, buletin, dan televisi yang dikenal selama ini sebagai media *mainstream*.

Media Baru (*new media*) begitu istilah menyebut keberadaan media sosial yang berkembang pesat di Indonesia, sekitar Tahun 2004 media baru dalam ruang media sosial itu seperti Blog, Twitter, Facebook, dan akses internet lain sebut saja android, gadget, berkembang merambah ruang publik (*public sphere*) meramaikan geliat ruang maya (*cyber sphere*). Penggunaannya sendiri yang mengisi *content* ruang maya itu adalah para

jurnalis warga dalam pusaran media indie, yang mempenetrasi bentuk personal blog, *Social Blog*, situs jejaring sosial Facebook dan jejaring sosial ruang publik maya yang bergerak tanpa jeda. Hal ini karena media sosial memiliki kekuatan sebagai media baru yang punya pengaruh sangat besar dalam menjalankan kekuatannya sebagai pengkritik dan pengawas dalam dunia informasi dan komunikasi dari berbagai kegiatan yang berlangsung datang dari berbagai belahan dunia dalam ketentuan hitungan waktu tercepat dari para jurnalis profesional dan media mainstream yang telah ada.¹

Adapun Undang-undang yang mengatur media sosial adalah Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Penggunaan media sosial pada era saat ini, juga digunakan anggota Kepolisian Indonesia (Polri). Sesuai Undang-undang 45 pasal 28F yang mengatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penggunaan media sosial dalam anggota Kepolisian, juga dalam rangka melaksanakan Grand Strategi Polri 2004-2025 yang meliputi pembenahan di bidang struktural, instrumental dan kultural yang dalam pelaksanaannya melalui tiga tahapan berdasarkan skala prioritas dan keberlanjutan (sustainability), yaitu membangun kepercayaan (trust building), kemitraan dan kerjasama (partnership dan networking) serta pelayanan prima (strive for excelent). Penggunaan media sosial di anggota Kepolisian juga sesuai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Seiring dengan penggunaan pelayanan online, Polda Jatim juga mengadopsi hal yang sama, yaitu menggunakan media sosial sebagai penyampaian informasi kepada publik. Adapun media sosial yang digunakan Polda Jatim yaitu:

1. Facebook

Salah satu akun media sosial yang dimiliki Polda Jatim dalam menyampaikan informasi yaitu facebook, dengan nama akun Polisi Polda Jatim @polisipolda jatim. Dalam penyampaian informasi di akun sosial media tersebut tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi di Polda Jatim, tetapi sampai pada informasi yang dihimpun oleh Polda lain. Banyak kejadian yang diunggah dalam akun facebook Polda Jatim, seperti peringatan Haormas di Polres Kota dan Balai Kota Kediri, aksi pengrebekan pelaku curamor di Nganjuk, dan masih banyak lagi informasi yang lai. Adapun gambar akun facebook Polisi Polda Jatim:

¹Widiantari, Komang Sri dan herduiyanto, Kartika Yohanes.2013. *Perbedaan Intensitas Komunikasi Melalui Jejaring Sosial antara Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Intrevenet pada remaja*. Jurnal Psikologi Udayama.



Sumber: <https://www.facebook.com/polisipoldajatim/>

2. Twitter

Tidak jauh halnya dengan Facebook Polda Jatim juga mempunyai akun Twitter yang digunakan dalam menyampaikan informasi. Adapun akun Twitter yang dimiliki Polda Jatim yaitu PID POLDA JATIM@PIDPoldaJatim. Akun ini sudah memiliki followers sebanyak 1.804.



Sumber: https://twitter.com/polisi_jatim

3. Instagram

Untuk meningkatkan pelayanan penyampaian informasi Polda Jatim juga membuat akun Instagram yang mempunyai nama akun Polisi Jatim. Adapun berita atau informasi yang disampaikan dari ketiga media tersebut hampir sama yaitu mengenai informasi-informasi yang terjadi di Polda Jatim. Gambar akun Instagram Polda Jatim.



Sumber: <https://www.instagram.com/explore/496168860577801>

Guna meningkatkan pelayanan publik beberapa Jajaran Polres Jatim juga sudah menggunakan media sosial sebagai alat penyampaian informasi kepada publik. Apalagi dilihat dari peta demografi Polda Jatim, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan salah satu Polres yang sering mendapatkan banyak kasus penyelundupan (narkotika, sabu-sabu, hewan dilindungi, pakaian bekas). Selain itu, tugas melayani masyarakat dan juga membantu administrasi pelabuhan membuat Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dituntut lebih aktif dalam menyampaikan informasi.

Keberhasilan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam menjalankan tugas dibuktikan dengan, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mendapatkan penghargaan Mitra Dharma Utama yang di berikan oleh PT. Mitra Dharma Utama sebagai aspirasi atas banyaknya penggalan kasus penyelundupan. Hal tersebut juga di beberkan dalam blog halopolisi.com pada 13 Agustus 2016. Keberhasilan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam mengungkap kasus juga bisa dilihat di tahun lalu. Seperti yang disampaikan dalam sebuah situs amunisinews.com, pada akhir tahun 2015 lalu Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana kriminal sebanyak 1325 kasus. Dari 1325 kasus yang ditangani sudah 1232 atau sekitar 93.3% terungkap atau terselesaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Motivasi Kinerja Polisi Karena Peran Media

Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu narasumber sebagai berikut:

“Reformasi Birokrasi Polri terus mengalami pembaharuan baik dari sisi paradigma maupun dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik”(AKBP Ronny Suseno, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, wawancara 28 Januari 2017).

Dalam pernyataan di atas, dapat diartikan jika kepolisian Indonesia, termasuk di Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak (KPPP), bertanggung jawab untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan bagi masyarakat. Pernyataan yang selaras juga dinyatakan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kita semaksimal mungkin menjadi mitra masyarakat, karena ini sudah menjadi tugas pokok kepolisian”. (Prpto, Anggota Satuan Reserse Kriminal, Wawancara 27 Januari 2017).

Untuk memulai dan membenahi Polri terkait dengan perannya di tengah-tengah masyarakat dan era reformasi terlebih dahulu harus menginventarisasi kembali semua tugas dan unsur, seperti tugas pokok, susunan organisasi, personil, hubungan tata cara kerja baik intern maupun extern, keadaan sarana dan prasarana, keuangan, pengawasan dan lain-lainnya. Implementasi ini harus dilakukan seakurat mungkin, sebab merupakan posisi awal dari proses menuju kemandirian, penyempurnaan, perbaikan dan pembaharuan. Salah satu narasumber memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Polisi selalu menjadi sorotan masyarakat sebab polisi merupakan aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Sepak terjang polisi akan langsung dilihat masyarakat.” (Eka, Anggota Satuan Reserse Kriminal, Wawancara 27 Januari 2017).

Pokok kehidupan etis polisi membawa dilema moral yang dalam. Etika pekerjaan polisi mensyaratkan adanya nilai moral yang dibangun terus-menerus dalam rangka menghadapi lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karenanya, media adalah salah satu fasilitas yang berkembang yang bermanfaat untuk perkembangan citra etika polisi, termasuk di Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak (KPPP) Surabaya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi polri tidaklah sederhana, karena polri sendiri butuh orang-orang yang professional dalam mengemasnya. Butuh pentahapan yaitu Strategi Polri itu sendiri, strategi polri itu di bagi tiga, diantaranya : *Trust Building* dan *Partnership Building*. Pada saat ini polri dan masyarakat ada di posisi kedua yaitu *partnership building*, dimana masyarakat itu sendiri di harapkan dapat merasakan bagian dari tugas polri, karena strategi ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat sehingga polri menjadikan masyarakat sebagai teman polri dengan suasana kebatinan tanpa ada keterpaksaan diantara dua belah pihak, diantaranya saling menolong, saling membantu, saling pengertian, solidaritas yang loyal, lebih mengarah ke persaudaraan sehingga timbul silih asah, asih, asuh, dengan harapan yaitu: timbulnya rasa persaudaraan antara polri dengan masyarakat.

“Polisi perlu melakukan tindakan yang dapat mengaktualisasikan diri serta citra mereka di mata masyarakat Indonesia dengan bantuan kemitraan dengan unsur

masyarakat dan teknologi serta media.” (AKBP Ronny Suseno, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, wawancara 28 Januari 2016).

Dalam pembaharuan tatanan pemerintahan, digalangkan pemanfaatan teknologi informasi demi menciptakan tatanan struktural dan fasilitas pelayanan masyarakat yang lebih modern, sesuai dengan perkembangan era. Tidak ada yang dapat menahan lajunya perkembangan teknologi informasi. Keberadaannya telah menghilangkan garis-garis batas antar negara dalam hal *flow of information*. Oleh karena itu, kepolisian pun mencoba berbagai kesempatan untuk menjadi lebih maju dan lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Salah satu narasumber menyatakan sebagai berikut:

“Media massa sebagai sumber informasi dan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam pembentukan pikiran serta sudut pandang penikmatnya. Saat ini informasi sangat mudah didapatkan dan sangat cepat informasi itu diterima oleh publik hingga ke belahan dunia” (Haryadi, Jurnalis Jatim Times, wawancara 25 Januari 2017).

Dalam pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa komunikasi massa merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia saat ini, sebagai sumber informasi yang luas dan dapat diandalkan. Dari sinilah informasi dibawa dan disampaikan ke seluruh pelosok daerah melalui berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Media massa mengacu pada media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula.

Meskipun, kemitraan media dan Polri rawan kesalahpahaman, karenanya kedua pihak pada hakikatnya memiliki peran yang berbeda, namun pada satu titik tertentu adanya media dapat meningkatkan kinerja Polri. Hal ini diungkapkan oleh salah satu narasumber yaitu sebagai berikut:

“Adanya media, kemarin karena KPPP menyidik salah satu pelanggaran perdagangan hewan/ satwa langkah ilegal, kemudian Polres lain di Polrestabes Surabaya juga mengadakan operasi di pasar hewan.” (AKBP Ronny Suseno, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, wawancara 28 Januari 2016).

Dari wawancara di atas, dapat diartikan bahwa adanya kemanfaatan dari media untuk kinerja Polri sangat baik, dimana pemberitaan mengenai penanganan suatu kasus dapat memunculkan motivasi kerja anggota Polri yang lain. Misalnya dalam kasus penangkapan perdagangan satwa liar di KPPP Surabaya. Salah satu narasumber menyatakan sebagai berikut:

“Kami waktu itu mengikuti KPPP Surabaya untuk melakukan inspeksi terhadap persiapan keberangkatan sebuah kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, dan faktanya ditemukan beberapa satwa langkah ilegal, yaitu Kakak Tua Jambul Kuning yang siap kirim, dan pemberitaan ini cukup viral” (Lisa, Jurnalis beritajatim.com, Wawancara 25 Januari 2017).

Dari pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa salah satu jurnalis portal berita *online* untuk melakukan inspeksi rutin yang dilakukan KPPP Surabaya di Pelabuhan Tanjung Perak dan mendapati kasus perdagangan satwa langka siap kirim. Faktanya, setelah penanganan kasus yang dilakukan oleh KPPP ini kemudian berdampak pada Polres lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan inspeksi rutin potensi jual beli satwa langka ilegal di tempat-tempat jual beli hewan. Hal tersebut terbukti setelah beberapa hari inspeksi yang dilakukan di KPPP Surabaya tersebut, kemudian menyusul Polres Mojokerto yang menggagalkan pengiriman satwa dilindungi. Hal ini sesuai pernyataan dari narasumber sebagai berikut:

“Setelah kasus di KPPP viral, ada laporan untuk portal berita kami tentang penyelundupan hwan/ satwa yang dilindungi di Mojokerto. Ada 78 ekor jenis Kakak tua hitam dan jenis burung lainnya.” (Misti, Jurnalis beritajatim.com, Wawancara 27 Januari 2017).

Pernyataan di atas, menyebutkan adanya kegiatan viral setelah pengungkapan jual beli serta penyelundupan satwa langka dilindungi dan jual beli satwa langka ilegal oleh KPPP Surabaya. Bahkan seralah itu, petugas gabungan KSDA wilayah Jatim, secara sigap melakukan razia di beberapa tempat bersama intel kepolisian Polres Jember.

Guna melakukan pencegahan perdagangan satwa langka petugas gabungan menyisir sejumlah pasar hewan petugas juga menggeledah lokasi penampungan satwa karena disinyalir terdapat hewan langka.

“Kamis pagi petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jatim, menyisir pasar burung gebang di pateran Jember razia juga melibatkan petugas kepolisian di resort Jember di lokasi ini petugas memeriksa satu persatu lapak pedagang termasuk sebuah kios yang dikunci pemiliknya dari dalam kios tersebut petugas menemukan berbagai satwa langka seperti berang berang, jalak dan burung langkalainnya seluruh satwa yang terjaring razia diamankan petugas untuk dikembalikan ke habitat asalnya,” (Misti, Jurnalis beritajatim.com, Wawancara 27 Januari 2017).

Di Indonesia sendiri, jika seseorang dalam menginginkan untuk memiliki satwa langka yang dilindungi oleh Pemerintah tanpa didasari dengan kepemilikan izin sesuai dengan syarat dan prosedur yang di sebutkan diatas maka hal tersebut merupakan suatu tindak pidana. Adapun kegiatan razia dan tindakan pidana ini dilakukan untuk memberikan efek edukasi kepada masyarakat mengenai satwa langka dan dilindungi pasalnya perdagangan satwa langka marak dilakukan sejak lama. Targetnya supaya masyarakat mengetahui bahwa mungkin beberapa jenis burung itu ternyata ada yang dilindungi tidak boleh diperjual belikan secara bebas.

Kasus di atas, baru mencerminkan satu yaitu perdagangan satwa langka yang dilindungi, belum lagi langkah KPPP dalam menelusuri *illegal fishing* di perairan Tanjung Perak yang kemudian membuat anggota Polres Gresik meningkatkan kewaspadaan penuh dan menggandeng seluruh anggota Polair untuk membantu KPPP. Hal ini sesuai pernyataan sebagai berikut:

“KPPP diajak kerja sama dalam penjagaan wilayah laut dalam hal illegal fishing oleh Polres Gresik. Ini biar, kasus *illegal fishing* bisa diminimalisir atau bahkan

dituntaskan, karena sudah ada hukum yang mengatur.” (Eka, Anggota Satuan Reserse Kriminal, Wawancara 27 Januari 2017).

Dari pernyataan di atas, dapat diartikan jika kerjasama KPPP dilakukan dengan Polres Gresik terkait keberhasilannya mengungkap illegal fishing di perairan Tanjung Perak, dan ini membuat motivasi Polres Gresik juga bertambah untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan wilayah Gresik. Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Surabaya. Fungsi wilayah penyanggah bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Surabaya, maka dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis. Selain itu, Gresik yang memiliki potensi perkembangan yang pesat juga dilengkapi dengan kepemilikan sumber daya perairan yang luas. Pernyataan salah satu narasumber menambahkan sebagai berikut:

“Tidak hanya Polres Gresik, bahkan, Polda Jatim juga meningkatkan kewaspadaan dengan menambah bantuan dari Polair Polda Jatim.” (AKBP Ronny Suseno, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, wawancara 28 Januari 2016).

Dari pernyataan di atas, pengungkapan kasus yang dilakukan KPPP yang kemudian terespos media membawa manfaat dengan menjadi viral, dan dapat meningkatkan motivasi kinerja anggota Polri lainnya. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi. Kinerja merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja tersebut atau dengan kata lain anggota Polri harus dibantu untuk mengerti semakin jelas perannya, mengenali peluang untuk mengambil resiko, mengadakan percobaan-percobaan dan bertumbuh didalam perannya, mengerti kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan diri sendiri dalam menjalankan berbagai fungsi dalam perannya tersebut.

Selain itu, ada juga masalah narkoba, dimana salah satu narasumber menyatakan sebagai berikut:

“Aparat Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan narkoba di atas kapal senilai Rp6 miliar berupa 2,1 kilogram sabu-sabu dan 2,9 kilogram pil ekstasi yang jumlahnya lebih dari 9.000 butir. Semua barang bukti sudah disita dan ada tiga tersangka.” (Prpto, Anggota Satuan Reserse Kriminal, Wawancara 27 Januari 2017)

Kemudian pada rentang waktu yang tidak berlangsung lama setelah pengungkapan, Polres Banyuwangi juga mulai memperketat jalur pelabuhan dan perairan banyuwangi untukantisipasi narkoba. Hal ini dikatakan oleh narasumber sebagai berikut:

“Terakhir kami memperhatikan perkembangan kinerja di Pelabuhan setelah berita penemuan kasus narkoba bernilai 6 M. Bahkan, aparat Kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur memperketat pengamanan di Pelabuhan Ketapang dengan melibatkan sebanyak 100 personel gabungan. Kesiagaan personel gabungan itu sudah terlihat dan sejumlah aparat kepolisian secara rutin

memeriksa kendaraan yang hendak masuk maupun keluar di Pelabuhan ASDP Ketapang”. (Haryadi, jurnalis Jatim Times, wawancara 25 Januari 2017).

Dari pernyataan di atas, dapat diartikan jika perkembangan kinerja Polres di Jatim menjadi meningkat, setelah penemuan-penemuan besar di khususnya wilayah Pelabuhan.

Media secara langsung mempengaruhi peningkatan motivasi polisi, ini sudah diketahui. Meskipun hal ini tidak mudah, sebab banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja. Hal ini dapat dilakukan oleh media sebagai mitra kepolisian untuk membuat sesuatu *viral* dan dapat bermanfaat untuk untuk kepolisian, dan masyarakat, jadi tidak hanya mengekspos hal-hal negatif mengenai kinerja kepolisian dari sudut pandang media sendiri.

Media massa sebagai sarana komunikasi dan informasi dapat melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat di akses oleh semua masyarakat secara massal pula. Informasi yang diberikan oleh media akan secara langsung akan mempengaruhi perubahan pola pikir dan prilaku masyarakat dalam menterjemahkan sistem sosial dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena media adalah institusi pelopor perubahan dalam penyebaran informasi. Informasi yang salah dapat menyebabkan perubahan sosial yang tidak baik dalam masyarakat begitu juga sebaliknya. Melalui tulisan ini saya akan membahas mengenai peran-peran media dalam mendorong perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Dalam suatu kesempatan, narasumber menyatakan sebagai berikut:

“Polisi banyak diberitakan oleh surat kabar, dan ini juga banyak menempatkan berita mengenai polisi di posisi yang penting. Ini menunjukkan polisi menjadi objek yang penting bagi surat kabar. Seiring dengan perhatian dan minat masyarakat pada berita-berita mengenai keamanan dan kriminalitas, berita yang berhubungan dengan polisi secara tidak langsung ikut banyak diberitakan. Dalam penelitian ini ditemukan, sebagian besar berita mengenai polisi ditempatkan di halaman kriminalitas.” (Misti, Jurnalis beritajatim.com, Wawancara 27 Januari 2017).

Dalam kaitannya dengan kinerja kepolisian, motivasi untuk mengungkapkan sesuatu karena kinerja yang diekspos oleh media menjadi bermanfaat. Hal ini dibenarkan oleh salah satu narasumber sebagai berikut:

“Polisi sebenarnya bisa termotivasi kalau pemimpin kami memotivasi untuk melakukan sesuatu yang telah diungkapkan oleh Polres lain, biasanya kalau kasus sudah diungkap disuatu daerah oleh polisi dan terekspos media, Kami jadi semakin bersemangat untuk melakukan hal yang sama.” (Prapto, Anggota Satuan Reserse Kriminal, Wawancara 27 Januari 2017).

Dari pernyataan di atas, dapat diartikan jika anggota KPPP bisa juga sangat bersemangat apabila melihat Polres lain semangat mengungkapkan suatu kasus. Apalagi jika media mendukung kepolisian dengan penuh untuk mengungkap kasus tersebut, dan semangat tersebut dikatakan sebagai motivasi. Polres Pelabuhan Tanjung Perak (KP3) Surabaya sejak diawal Januari hingga Desember 2016 lalu, telah berhasil mengungkap beberapa kasus tindak kriminal sebanyak 1325 kasus dan sudah terselesaikan

mencapai 1232 atau 93,3%, hal ini disampaikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sebagai berikut:

“Polres KPPP, telah mengungkap banyak kasus kriminal, sudah tercatat ada 1232 atau 93,3% dari 1325 kasus, sebagai pemimpin kami terus memberi motivasi dan memberikan mereka contoh dari pengungkapan Polres lain yang memiliki kinerja yang baik, agar mereka juga termotivasi.” (AKBP Ronny Suseno, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, wawancara 28 Januari 2016).

Motivasi merupakan bagian dari dinamika hidup yang sangat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal organisasi. Motivasi dalam konteks organisasi merupakan masalah yang kompleks, karena kebutuhan dan keinginan setiap anggota organisasi berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini berbeda karena setiap anggota suatu organisasi adalah unik secara biologis maupun psikologis, dan berkembang atas dasar proses belajar yang berbeda pula. McClelland (1987) yang menyatakan bahwa motivasi berprestasi adalah dorongan dalam diri individu untuk mencapai keberhasilan dalam mengerjakan tugas-tugas yang penuh tantangan, dengan suatu ukuran keunggulan yaitu perbandingan dengan prestasi orang lain atau standard tertentu.

Dorongan untuk berprestasi ini tercermin dari perilaku individu yang selalu mengarah pada standard keunggulan (*standard of excellence*), bertanggung jawab, dan terbuka terhadap umpan balik guna memperbaiki prestasi. Beberapa pengertian diatas dapat memberi pemahaman bahwa motivasi berprestasi dalam kaitannya dengan dunia kerja adalah dorongan dalam diri individu untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan mencapai prestasi kerja yang lebih baik dari orang lain.

Secara umum Vivian (2008: 450) menyatakan bahwa penggunaan media massa adalah untuk tujuan memberi informasi, menghibur atau membujuk. Tujuan penggunaan media massa menurut Vivian ini adalah sederhana namun sangat jelas. Dengan demikian banyak hal yang seharusnya bisa didapatkan masyarakat dan juga kepolisian dengan penggunaan media massa secara bijak.

Seperti dinyatakan oleh Vivian tersebut maka berbagai informasi, kegiatan hiburan ataupun upaya membujuk secara positif pada masyarakat dapat dilakukan dengan penggunaan media massa itu. Sejumlah fungsi pers atau media massa di dalam masyarakat adalah sebagai berikut ini: a) fungsi menyiarkan informasi (*to inform*), b) fungsi mendidik (*to educate*), c) fungsi menghibur (*to entertain*), dan d) fungsi mempengaruhi (*to influence*).

Masih terdapat banyak fungsi yang dimiliki media massa bagi para remaja selain fungsi menghibur tersebut. Terdapat peranan media khususnya dalam upaya memperingatkan dan membangkitkan kewaspadaan masyarakat terhadap suatu tindak kriminal. Menurutnya “berbagai poster, stiker, billboard, slide di bioskop dan televisi yang berisikan pesan tentang bahaya maraknya tingkat kriminal perlu disebarluaskan untuk memperingatkan dan membangkitkan kewaspadaan masyarakat (*public awareness*)”.

Mengaitkan fungsi pers atau media massa yang dinyatakan oleh Vivian dan Effendy sebelumnya maka fungsi atau peranan yang disebutkan oleh Nawawi sangat terkait dengan fungsi pemberian informasi dan fungsi mempengaruhi, dan proses mempengaruhi ini dapat dikaitkan dengan efektifitas kinerja suatu lembaga.

“Peran media sebagai pencerah masyarakat atau sebagai media pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan sosial dari aspek perubahan pola pikir masyarakat, ini juga bisa menimbulkan motivasi maupun justru menimbulkan sesuatu yang negatif, makanya media dianjurkan untuk memiliki prinsip penyiaran yang mendidik dan membawa ke arah positif.” (Haryadi, jurnalis *Jatim Times*, wawancara 25 Januari 2017).

Dari pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa media dianjurkan untuk membawa suatu hal ke arah positif untuk mempengaruhi masyarakat ke arah yang positif pula, termasuk untuk peningkatan kinerja kepolisian. Perubahan sosial dari aspek perubahan pola pikir ditandai dengan adanya pola pikir baru dari masyarakat tersebut. Perubahan sikap diawali dari perubahan pola pikir masyarakat. Media sebagai pendidik dalam penyampaian informasinya menyesuaikan dengan khalayak yang heterogen dan berbagai sosio ekonomi, kultural dan lainnya agar penyampaian informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Perubahan pola pikir ini sebagai proses pembangunan bangsa dan karakter bangsa Indonesia yang diharapkan pada masa depan.

Mengenai kinerja kepolisian, KPPP berharap pemberitaan tidak hanya selalu membentuk pola pikir masyarakat tentang polisi menjadi buruk, hal ini dinyatakan oleh narasumber sebagai berikut:

“Banyak berita mengenai polisi akhir-akhir ini berkaitan dengan maraknya surat kabar kriminal atau tayangan kriminal di televisi. Berita yang dimuat seringkali menyudutkan dan memberi kesan buruk pada kinerja polisi; misalnya memberitakan polisi yang salah tembak atau salah tangkap, polisi yang menjadi bandar atau beking judi dan kegiatan kriminal. Berita-berita seperti ini bisa mempengaruhi penilaian masyarakat dan kinerja kami.” (Eka, Anggota Satuan Reserse Kriminal, Wawancara 27 Januari 2017).

Sama seperti penggambaran terhadap institusi polisi, penggambaran terhadap anggota polisi memperlihatkan aspek moralitas menjadi pekerjaan utama bagi polisi. Dari penelitian ini terlihat, sebanyak 15.6% berita mengenai anggota polisi melihat moralitas anggota polisi yang buruk. Surat kabar banyak memberitakan soal polisi yang bisa disogok dan sebagainya. Pada gilirannya, berbagai peristiwa itu mempengaruhi citra anggota polisi secara keseluruhan. Mungkin ada anggota polisi yang baik, tetapi karena ada sebagian anggota polisi yang mempunyai moralitas buruk akhirnya polisi yang baik kena getahnya juga, dan kinerja anggota polisi menjadi menurun, karena stigma yang diperoleh.

Kinerja atau performance dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kelompok atau organisasi tertentu. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai antara lain kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan mereka dengan organisasi. Teori kinerja adalah teori psikologis tentang proses tingkah laku seseorang sehingga ia menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaan.

Kinerja seseorang merupakan fungsi gabungan dari ketiga faktor penting yaitu kemampuan, perangsang dan minat; Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja; Tingkat motivasi. Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Kinerja

merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas. Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh fungsi atau jabatan tertentu dalam periode waktu tertentu. Dari batasan batasan tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Polisi sejatinya merupakan lembaga yang memiliki aturan yang ketat dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Sehingga, setiap perilaku akan sangat terkontrol sesuai peraturan-peraturan tegas yang mengikatnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

”Sebenarnya, meskipun ada keinginan untuk terus bekerja maksimal, polisi diikat oleh peraturan-peraturan tegas yang tidak bisa sembarangan dalam bertugas. Termasuk salahsatunya adalah kita tidak boleh bergerak sendiri tanpa adanya surat perintah penyelidikan atau penyidikan. Bahkan untuk kegiatan razia rutin juga ada standar operasionalnya (SOP), ini yang kemudian menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan setiap kinerja kepolisian termasuk di KPPP”. (Eka, Anggota Satuan Reserse Kriminal, Wawancara 27 Januari 2017).

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun anggota polisi ingin bekerja maksimal namun tidak semua dapat dilakukan dengan cepat dan segera karena polisi ditur oleh standar operasional prosedural (SOP). Budaya kerja organisasi Polri disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan, sehingga kinerja pelayan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Selain upaya tersebut Polri juga harus memiliki dan menerapkan prosedur kerja yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasi dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan standar operasional prosedur (SOP) adalah untuk menciptakan tanggung jawab mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance*. Standar operasional prosedur (SOP) tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena standar operasional prosedur dapat juga digunakan untuk mengukur responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Alur Pembentukan Motivasi Polisi setelah Adanya Peran Media

Tuntutan masyarakat yang menginginkan agar institusi mempunyai kinerja yang baik membuat semua organisasi pemerintah berbenah dan berupaya menampilkan kinerja sebaik mungkin atau setidaknya menampilkan adanya suatu perubahan. Hal ini diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Ya, sekarang polisi harus bisa melindungi rakyat kecil, kalau tidak siapa lagi yang melindungi kami. Harus bisa lebih bertanggung jawab.” (Sunarno, Warga Demak Surabaya, Wawancara 28 Januari 2017).

Dari pernyataan di atas, menjelaskan bahwa masyarakat sebagai kelompok yang berhak meminta untuk dilindungi sesuai amanat Undang-Undang di Indonesia terus menuntut kepolisian agar dapat maksimal dalam bertugas dan berubah menjadi lebih

tanggung jawab. Bentuk perubahannya pun bervariasi dari yang mencoba sekedar mengubah tampilan sampai dengan benar-benar berusaha mengubah budaya organisasi sesuai keinginan masyarakat.

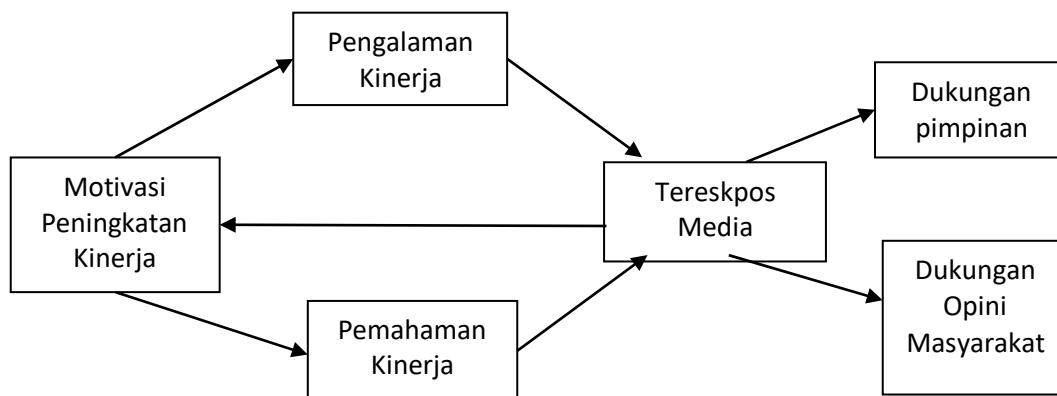
Motivasi merupakan keadaan internal diri seseorang yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilakunya. Motivasi seharusnya sebagai suatu proses yang ikut menentukan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dalam wawancara dengan narasumber menyatakan sebagai berikut:

“Dalam prosesnya, motivasi tidak terjadi begitu saja, ada tahapan yang kemudian dilewati anggota KPPP untuk dapat bersemangat dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja saat dilapangan. Sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan” (AKBP Ronny Suseno, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, wawancara 28 Januari 2016).

Dari pernyataan di atas, diartikan bahwa motivasi adalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan tertentu. Tujuan yang, jika berhasil dicapai, akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sehingga berdasarkan beberapa definisi diatas mengenai motivasi, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah proses yang membangkitkan, mengarahkan dan menjaga atau memelihara perilaku manusia agar terarah pada suatu tujuan.

Pemahaman kinerja yaitu sikap atau perilaku individu dalam menjalankan tugas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja dipengaruhi motivasi yaitu dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan tugas atas dasar pemenuhan kebutuhan individu sehingga menemukan kepuasan dan kesenangan dalam melakukan tugas. Penelitian tentang bagaimana motivasi mempengaruhi kinerja polisi. Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara motivasi dan kinerja polisi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi polisi untuk merubah kinerja, yaitu polisi harus rela dan mampu merubah kinerja dan bagaimana merubah kinerja sebelumnya kearah positif.

Adapun skema untuk membentuk motivasi peningkatan kerja polisi oleh media, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1 Skema Terbentuknya Motivasi Peningkatan Kinerja oleh Media

Skema di atas menjelaskan bahwa motivasi bisa muncul jika ada pengalaman kinerja anggota Polri yang memadai, pemahaman mengenai kinerja yang cukup, kemudian adanya bantuan ekspos dari media kearah positif serta adanya dukungan pimpinan dan dukungan opini masyarakat yang terbentuk.

Pengetahuan dan pengalaman dalam bertugas merupakan hal paling utama untuk memunculkan motivasi peningkatan kinerja oleh Polisi, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

“Jika kami memahami standar operasional di lapangan, akan mendukung kepercayaan diri kami dalam bertugas, sama seperti Polres yang sigap dalam mengungkapkan kasus.” (Eka, Anggota Satuan Reserse Kriminal, Wawancara 27 Januari 2017).

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa pengetahuan akan membangkitkan rasa percaya diri anggota Polri sehingga dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya seperti anggota Polri yang lain yang lebih sigap dalam mengungkapkan kasus.

Tabel 3.2 Peran Media dalam Meningkatkan Motivasi Kinerja Polres KPPP

Peran Media	Manfaat untuk KPPP	Manfaat untuk Polri di Polres/Polsek Lain	Nilai/Values yang dimunculkan
Menyiarkan Informasi	Terekspos dalam Melaksanakan Kinerja	Melihat kinerja Polres KPPP	Motivasi kinerja dalam pengungkapan kasus
Fungsi Mendidik	Memberitakan hal yang positif	Membentuk opini publik menjadi positif mengenai Polri	Citra Polisi menjadi baik
Mempengaruhi	Meningkatkan intensitas pemberitaan tentang kinerja KPPP	Meningkatkan motivasi instrinsik anggota Polri lain	Memunculkan sifat kompetitif dalam pengungkapan kasus oleh anggota lainnya

Sumber: diolah

Dari pengalaman-pengalaman anggota dalam menangani kasus, maka akan terbentuk persepsi diri terhadap pelaksanaan tanggung jawab di lapangan. Selain itu media massa juga mempunyai andil dalam memberitakan berita tentang tindakan polisi ke arah yang positif bukan ke arah yang menyudutkan perilaku polisi sehingga membentuk opini publik yang salah. Mengenai opini publik ini salah satu narasumber mengungkapkan sebagai berikut:

“Kami sering nonton berita kriminal, kadang polisi baik tapi lebih sering polisi itu kasar-kasar, jadi ya menurut kami polisi masih belum berubah.” (Andik, Warga Surabaya, wawancara 28 Januari 2017).

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa sebagian opini masyarakat mengenai polisi masih buruk karena adanya ekspos media ke arah yang negatif, hal ini kemudian

mempengaruhi opini masyarakat tersebut. Akan tetapi, pada dasarnya efek media tidak terlampau kuat mempengaruhi masyarakat karena masyarakat menampung pemberitaan di media dan mencari tahu pendapat orang lain mengenai pemberitaan negatif di media massa tentang sosok polisi agar mengetahui apakah fakta yang terjadi sesuai dengan apa yang ada dalam pemberitaan di media massa. Setelah masyarakat tahu fakta yang sebenarnya, baru kemudian masyarakat membentuk persepsi yang mencitrakan polisi. Dari persepsi yang terbentuk dari pengalaman maupun dari terpaan media massa, masyarakat akhirnya membentuk opini pribadi tentang citra polisi.

Kemudian mengenai opini publik ini sendiri, salah satu narasumber menyatakan sebagai berikut:

“Kami di lapangan sering mendapati masyarakat yang takut terhadap kami, dan masih sebagian masyarakat memperlakukan kami layaknya orang yang hanya peduli terhadap citra, ini membuat motivasi untuk mengungkapkan kasus menjadi berkurang.” (Eka, Anggota Satuan Reserse Kriminal, Wawancara 27 Januari 2017).

Dari pernyataan di atas, dapat diartikan jika opini masyarakat mengenai polisi yang lebih menampilkan kepentingan untuk merubah citra semata, mempengaruhi keinginan anggota KPPP untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan perilaku kerja Polri. Melalui motivasi, seorang anggota Polri didorong dan diarahkan perilakunya untuk melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan secara efektif. Selain itu, adanya motivasi dapat membantu seorang Polri mengembangkan profesionalisme mereka dan membangun budaya kerja yang baik, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk Polri dipromosikan.

Memotivasi orang untuk bekerja dengan baik merupakan salah satu problem pokok dalam setiap organisasi. Dalam lingkungan organisasi, ini bukan tugas yang mudah. Karena banyak orang hanya mendapatkan kepuasan pribadi dari pekerjaan mereka dan mempunyai rasa berprestasi dan inovasi yang belum optimal. Adanya motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan akan menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang akan menentukan besar kecilnya prestasi.

Oleh karena itu, peran media untuk lebih memperhatikan sudut pemberitaan polisi dan tema apa yang lebih banyak dapat mempengaruhi kinerja polisi harus lebih diperhatikan, dibandingkan hanya menampilkan pemenuhan berita saja namun menggiring opini masyarakat terhadap kinerja polisi ke arah yang bernilai negatif.

Simpulan

1. Beberapa peran media dalam meningkatkan kinerja Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu:
 - a. Menyiarkan informasi dalam kaitannya dengan kinerja kepolisian, sehingga meningkatkan motivasi untuk mengungkapkan suatu kasus karena kinerja yang diekspos oleh media akan memberikan pertimbangan pemberitaan bagi masyarakat serta menjadi motivasi bagi aparat yang mengungkapkan kasus yang terjadi.

- b. Membeikan peran edukasi bagi masyarakat yang berguna untuk merubah citra polisi menjadi lebih baik.
- c. Memberikan pengaruh kompetitif bagi para anggota kepolisian untuk saling terpacu dalam pengungkapan kasus, karena bagi pengungkap kasus pasti namanya akan terekspos di media.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya kontrak kerjasama penggunaan slot tayang program Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan media atau televisi lokal agar tersosialisasikan program-program serta progres pengungkapan kasus di Jajaran Polres Tanjung Perak.
2. Diharapkan adanya dukungan pendidikan kejuruan dengan spesialisasi media kehumasan untuk meningkatkan kemampuan anggota semaksimal mungkin dalam menghadapi media serta penyajian informasi dengan benar.

Daftar Pustaka

- Adams-Byers, J., Whitsell, S.S., & Moon, S.M. (2004). Gifted students' perceptions of the academic and social/emotional effects of homogeneous and heterogeneous grouping. *Gifted Child Quarterly*, 48(1).
- Anwari. 2010. 100 Software Donwloader Ajaib. Jakarta: PT Alex Komputindo.
- As'ad, M, 2003, Psikologi Industri : Seri Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Liberty.
- Bejo, Siswanto. (2005). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Adminitratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara
- Campbell, et. al. 1999. *Managerial Behavior, Performance, and Effectiveness*. New York: McGraw-Hill Book Co.
- Dharma, Surya. 2005, Manajemen Kinerja, Jakarta. Penerbit: Pustaka Pelajar.
- Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni. 2012. *Pengantar Epidemiologi E/2*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Ferdianto, Hengki. 2010. Cara Menghasilkan Uang dengan Blog. C.V Andi Offset: Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta
- Herlianti, Yanti. 2014. Pengembang Blog Ques+berbasis isu Sosisointifik Untuk Mengembangkan Keterampilan Berargumentasi. Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung.
- Husein Umar, 2005. Metode Penelitian, Jakarta : Salemba Empat
- Husni. Alien Chairina. 2013. Opini Publik di Media Sosial Twitter (Analisis Isi Opini Kekerasan Seksual Pada Anak). *Jurnal Komunikasi*. Universitas Hasanuddin.
- John W. Creswell. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Kaplan, Andreas. M. dan Haenlein, Michael. 2010. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*.
- Masitahsari, Ummi. 2015. Analisis Pegawai Puskesmas Jongaya Makasar. *Jurnal Administrasi Negara*. Universitas Hasanuddin.
- Prawirosentono, S, 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan. BPFE, Yogyakarta.
- Prawitra Thalib, S. H., and ACI Arb MH. *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Airlangga University Press, 2018.
- Puntoadi, Mudrajat. 2009. Menciptakan Penjualan Melalui Social Media. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rendro. *Beyond Borders: Communication Modernity & History The Forst LSPR Communication Research Conference 2010*. London: STIKOM The London School of Public Relations, 2010.
- Rivai, Veithzal, 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanjaya, Ridwan. Wibhowo, Christine. Prasetyo, Arista. 2010. Parenting untuk Pornografi di Internet. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Soeprihanto, John. 2000. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Vol 02, No 01, 2023, Janaloka

- Thalib, P., Kurniawan, F., Maradona, M., & Kholiq, M. N. (2021). PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKESINAMBUNGAN YANG BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN PROFIT YANG MEMBAWA KEMASLAHATAN BAGI LINGKUNGAN. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 5(2), 456-462.
- THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.
- Thalib, P. (2013). Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia.
- Thalib, Prawitra. "Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Pedagangan Internasional." *Yuridika* 27.1 (2012): 35-46.
- Putri, Erika Sefila, and Wisudanto Wisudanto. "Struktur pembiayaan pembangunan infrastruktur di indonesia penunjang pertumbuhan ekonomi." *IPTEK Journal of Proceedings Series* 3.5 (2017).
- V, Djong. 2008. Panduan Praktis Sharen Point Server 2007. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Widiantari, Komang Sri dan herduiyanto, Kartika Yohanes.2013. *Perbedaan Intensitas Komunikasi Melalui Jejaring Sosial antara Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Intrevenet pada remaja*. Jurnal Psikologi Udayama.
- Widiastuti. Anik.2009. Dampak Positif dan Negatif Teknologi.Junal teknologi Informasi UNY.
- Winarsi, S., HAJATI, S., KHOLIQ, M. N., & THALIB, P. (2021). Sharia banking dispute resolution in Indonesia after the verdict of the constitutional court no. 93/puu-x/2012. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(2), 408-416.
- Wisudanto, W., Thalib, P., Kholiq, M. N., Putri, T. V., & Putri, T. V. (2022). Social Action Of Student In Achieving Non-Academic Achievements In Interest And Talent-Based School. *Airlangga Development Journal*, 6(1), 55-65.
- Zaki, Ali dan SmitDev Community. Membuat Website 2.0 Aman, Lengkap dan Powerful Berbasis Joomla. . PT Alex Media Komputindo: Jakarta.